

LAPORAN PENELITIAN



PENGARUH SBIS DAN INFLASI TERHADAP TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI 2017- MEI 2020

OLEH :

NURUL JANNAH
NIP. 19920217 201903 2 018

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATER UTARA
MEDAN
2020**

**Judul : PENGARUH SBIS DAN INFLASI
TERHADAP TRANSAKSI PASAR UANG
ANTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2017-2019**

**Nama : NURUL JANNAH
NIP : 19920217 201903 2 018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

NURUL JANNAH

**PENGARUH SBIS DAN INFLASI TERHADAP
TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE JANUARI 2017- MEI 2020**

x + 77 halaman, 13 tabel, 3 lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SBIS dan Inflasi terhadap transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SBIS, Inflasi dan transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dari bulan Januari 2017 sampai Mei 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *kuantitatif* dengan analisis regresi linier berganda.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, penulis menyimpulkan bahwa Besarnya pengaruh SBIS (X_1) terhadap PUAS jika terjadi kenaikan 1% pada jumlah penduduk maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp 0,006 juta. Secara parsial variabel SBIS (X_1) memiliki nilai t_{hitung} $0,128 < 2,042$ dari t_{tabel} artinya tidak signifikan. Maka SBIS secara parsial tidak berpengaruh terhadap PUAS. Begitu juga dengan variabel Inflasi (X_2) jika terjadi kenaikan 1% maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp 148,633 juta. Secara parsial memiliki nilai t_{hitung} $-2,175 > 2,042$ dari t_{tabel} artinya signifikan. Maka Inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap PUAS. Secara serempak (simultan) variabel SBIS dan Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bank syari'ah di Sumatera Utara berdasarkan uji F.

Kata Kunci : SBIS, Inflasi, Pasar Uang Antar Bank, Otoritas Moneter, Kebijakan Moneter

**FACULTY OF ISLAMIC ECONOMIC AND BUSINESS
DEPARTMENT OF SHARIA ECONOMIC**

NURUL JANNAH

**The Influence of SBIS and Inflation on Sharia Interbank
Monet Market Transactions in Indonesia , Januari 2017 –
Mei 2020 Period**

x + 77 pages, 13 tables, 3 attachments

ABSTRACT

This study aims to find out how much influence the SBIS and inflation have on the Sharia Interbank Money Market (PUAS) transaction. The sample used in this study is SBIS data, inflation and Sharia Interbank Money Market (PUAS) transactions from January 2017 to May 2020. The research approach used is a quantitative research approach with multiple linear regression analysis.

From the results of research conducted at alpha 5%, the authors conclude that the magnitude of the influence of SBIS (X1) on PUAS if there is a 1% increase in the population will increase funding by Rp. 0.006 million. Partially the SBIS variable (X1) has a tcount of $0.128 < 2.042$ from ttable, meaning that it is not significant. So SBIS partially has no effect on PUAS. Likewise with the inflation variable (X2) if an increase of 1% will increase financing by Rp 148,633 million. Partially having a t-count of $-2.175 > 2.042$ of ttable is significant. Then Inflation partially negatively affects PUAS. Simultaneously (SBIS) variable and inflation has a positive influence on Islamic bank financing in North Sumatra based on the F test.

Keywords: SBIS, Inflation, Sharia Interbank Money Market, Monetary Authority, Monetary Policy

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara:

Nama : **Nurul Jannah, M.E**
NIP : 19920217 201903 2 018
Tempat/tanggal lahir : Sigli, 17 Februari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 : UIN Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian : Pengaruh SBIS dan Inflasi terhadap
 Pasar Uang Antar Bank Syariah di
 Indonesia Periode Januari 2017- Mei
 2020

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Juli 2020
Konsultan I,

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh SBIS dan Inflasi terhadap Pasar Uang Antar Bank Syariah di Indonesia Periode Januari 2017- Mei 2019”.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam laporan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya laporan ini. penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi untuk penulis maupun untuk semuanya.

Medan, 15 Juli 2020

Nurul Jannah, M.E
NIP.199202172019032018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iii
SURAT REKOMENDASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permusuan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Yang Relevan	31
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Hipotesis	35
METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Defenisi Operasional Variabel.....	36
E. Analisis Data	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	57
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data PUAS dan SBIS tahun 2019	5
Tabel I.2 Data Inflasi Tahun 2019.....	7
Tabel III.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	42
Tabel IV.1 Sertifikat Bank Indonesia Syariah.....	46
Tabel IV.2 Data Inflasi	47
Tabel IV.3 Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.....	48
Tabel IV.4 Deskriptive Statistics.....	49
Tabel IV.5 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel IV.8 Hasil Koefisien Determinasi	55
Tabel IV. 9 Hasil Uji t	56
Tabel IV.10 Hasil Uji f	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar IV.1 Histogram Uji Normalitas	50
Gambar IV.2 Normal P-P Plot.....	50
Gambar IV.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah satu indikator pertumbuhan ekonomi baik itu yang tergolong pada lembaga keuangan bank maupun non bank. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari pengertian tersebut kita ketahui bahwa bank bertindak sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dalam rangka pengelolaan dana, baik dari pihak yang kelebihan dana maupun kekurangan dana, maka suatu bank harus memiliki likuiditas yang memadai. Dengan likuiditas yang memadai, maka suatu bank mampu menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan kaidah perbankan.

Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perantara keuangan. Salah satu bentuk pasar keuangan adalah pasar uang yang dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari satu tahun.²

Kegiatan di pasar uang baik secara umum maupun dengan prinsip syariah terjadi karena ada dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak yang kelebihan dana dalam jangka waktu yang pendek juga. Kedua belah pihak ini dipertemukan di dalam pasar uang,

¹Anggota IKAPI, *Lima Undang-undang Moneter dan Perbankan*, (Bandung : Fokus Media, 2009), h. 67.

²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 201.

sehingga pihak yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak yang kelebihan dana memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.³ Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Jangka waktu pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.⁴ Dalam praktek konvensional dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan adalah secara kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.

Suatu bank yang mengalami kebangkrutan cenderung dikarenakan bank tersebut tidak mampu memobilisasi dana dengan baik, atau bank tersebut mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*. Seperti yang kita ketahui salah satu risiko yang berkaitan dengan aktifitas perbankan adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.⁵ Jika risiko likuiditas dapat dihindari atau dikendalikan maka kemungkinan suatu bank mengalami kebangkrutan juga semakin sedikit. Oleh sebab itu pula dengan ikut serta dalam transaksi pasar uang diharapkan mampu menghindari risiko likuiditas tersebut.

Sama halnya dengan bank syariah, dalam pengelolaannya bank syariah juga rentan terhadap ketidakpastian, dimana bank tidak dapat menentukan berapa banyak dana yang terhimpun dan berapa banyak dana yang tersalurkan kepada masyarakat. Untuk itu adanya kegiatan yang disebut pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan

³*Ibid*, h. 202.

⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), h. 235.

⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking "sebuah teori, konsep dan aplikasi"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 984.

mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.⁶

Secara umum fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan peserta lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka penempatan dana yang kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam operasi pasar terbuka melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Sedangkan pasar uang syariah merupakan pasar tempat bank-bank syariah menjual dan membeli instrumen keuangan. Keberadaan pasar uang syariah diakui secara internasional dengan lahirnya Bahrain Moneter Agency (BMA) dan Bank Negara Malaysia. Pada dasarnya pasar uang dan pasar uang syariah memiliki fungsi yang sama yaitu mengatur likuiditas.⁷

Guna mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal telah dilakukan pengaturan likuiditas perbankan syariah melalui kebijakan giro wajib minimum (GWM). Berkenaan dengan itu Bank Indonesia mengeluarkan regulasi tentang Giro Wajib Minimum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, menyatakan bahwa bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK (dana pihak ketiga) dalam rupiah.⁸ Bank yang memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan memiliki DPK lebih besar

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2009), h. 203.

⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current...*, h. 236.

⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, diakses dari www.bi.go.id tanggal 03 November 2015, 11:35 AM.

dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen). Dari regulasi tersebut kita ketahui bahwa bank syariah lebih ditekankan pada penyaluran pembiayaan daripada bertransaksi di pasar uang. Oleh sebab itu keberadaan pasar uang syariah dimaksudkan hanya untuk membantu bank syariah yang mengalami risiko likuiditas baik itu kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas, bukan berspekulasi atau mencari keuntungan semata.

Dalam perbankan konvensional yang dijadikan acuan untuk menentukan tingkat suku bunga adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sedangkan untuk perbankan syariah dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah*.⁹

Sebelum SBIS instrumen pasar uang yang digunakan dengan prinsip syariah adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang merupakan penitipan dana jangka pendek bank yang kelebihan likuiditas untuk jangka waktu tertentu dengan akad *wadi'ah*. Atas penempatan dana tersebut Bank Indonesia memberikan bonus yang mengacu kepada tingkat indikasi imbalan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) di pasar uang antarbank syariah (PUAS). SWBI berlaku sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya regulasi tentang SWBI

⁹Akad *Ju'alah* adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seorang pemberi tugas yang disebut *Ja'il*, yang mengikatkan diri untuk memberi imbalan (*ju'al*) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau telah berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh *ja'il*. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), cetakan 1, h. 358.

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI 2004, kemudian diganti dengan SBIS pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya regulasi tentang SBIS dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/2008 tentang SBIS. Berikut data transaksi pasar uang antarbank syariah, instrumen SBIS tahun 2019 :

Tabel I.1. Data PUAS dan SBIS tahun 2019

No.	Bulan	PUAS(miliar Rp)	SBIS (miliar Rp)
1.	Januari	241	10.895
2.	Februari	383	12.725
3.	Maret	1.394	14.415
4.	April	838	13.849
5.	Mei	768	14.124
6.	Juni	1.165	13.604
7.	Juli	595	12.989
8.	Agustus	687	11.534
9.	September	1.397	11.394
10.	Oktober	200	9.045
11.	November	722	9.600
12.	Desember	855	10.436

Sumber : www.bi.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa transaksi PUAS mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, berbeda dengan SBIS yang pergerakan tergolong stabil. SBIS dan PUAS merupakan instrumen pasar uang syariah, secara teori keduanya memiliki hubungan dimana jika imbal hasil SBIS lebih rendah dari imbal hasil PUAS maka bank syariah akan memilih bertransaksi di PUAS, begitu juga sebaliknya jika imbal hasil PUAS lebih rendah dari imbal hasil SBIS maka bank syariah memilih menempatkan dananya di SBIS.

Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, pengendalian suku bunga jangka pendek di pasar uang antar bank sangat penting sebagai arah kebijakan moneter yang selanjutnya ditransmisikan menjadi suku bunga jangka menengah dan panjang. Kebijakan moneter yang diambil melalui pasar terbuka akan mempengaruhi berbagai tingkat suku bunga dan imbal hasil di pasar uang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap variabel makro ekonomi seperti nilai tukar, konsumsi, investasi dan pada

akhirnya berdampak pada tingkat inflasi. Inflasi merupakan variabel makro yang sangat penting karena mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi.

Tujuan Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama akan tercermin pada laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap negara lain. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yang berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun kedepan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Karena ketika inflasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi maka dampaknya sangat jelas dirasakan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.¹⁰

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia juga dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pencapaian tujuan yang dimaksud di atas adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang merupakan sasaran akhir dari kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu melalui operasi moneter syariah yang selanjutnya mempengaruhi likuiditas perbankan syariah. Pelaksanaan operasi moneter syariah mempengaruhi tingkat imbal hasil pasar uang antar bank

¹⁰<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses 21 April 2015, 16.32 WIB.

syariah. Tingkat imbal hasil PUAS sebagai instrumen likuiditas perbankan syariah akan mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh sektor perbankan akan mempengaruhi sektor riil yang diharapkan mampu mencapai sasaran akhir kebijakan moneter.

Terpeliharanya stabilitas moneter adalah suatu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas nasional yang baik memiliki pengaruh yang luas terhadap kegiatan perekonomian, termasuk di sektor perbankan. Pada umumnya indikator kebijakan moneter dilihat dari suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi tolak ukur stabilitas moneter juga dilihat dengan mengukur laju inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah dan ekspektasi masyarakat terhadap moneter. Keempat tolak ukur ini bisa dilihat dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan kegiatan perbankan yang sehat baik secara langsung dan tidak langsung.¹¹Berikut data inflasi :

Tabel I. 2. Data Inflasi Tahun 2019

No.	Bulan/Tahun	Inflasi (%)
1.	Januari	2.82
2.	Februari	2.57
3.	Maret	2.48
4.	April	2.83
5.	Mei	3.32
6.	Juni	3.28
7.	Juli	3.32
8.	Agustus	3.49
9.	September	3.39
10.	Oktober	3.13
11.	November	3.00
12.	Desember	2.72

Sumber : bi.go.id

Jika diperhatikan dari Januari hingga September 2019 inflasi mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup

¹¹ Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51.

signifikan di setiap bulannya. Apakah kondisi ini masih tergolong stabil, sesuai dengan target inflasi yang di dibuat Bank Indonesia selaku bank sentral.

Dampak yang paling akhir akan terlihat pada pergerakan inflasi. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

Melalui mekanisme pasar uang, bank yang mengalami masalah likuiditas akan merasa terbantu dalam aktivitas perbankan yang berdampak pada sektor riil dan outputnya adalah inflasi. Sejalan dengan itu tujuan Bank Indonesia menerbitkan instrumen pasar uang melalui operasi moneter adalah mengurangi jumlah uang beredar yang juga akan terlihat melalui inflasi. Sementara itu transaksi pasar uang antarbank syariah yang merupakan salah satu instrumen pasar uang syariah yang dipengaruhi oleh variabel makro seperti inflasi dan juga variabel lain yang merupakan instrumen pasar uang juga. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dari masing-masing variabel. Sehingga sangat menarik untuk dikaji bagaimana mekanisme kebijakan moneter berupa instrumen pasar uang terhadap pasar uang antarbank syariah itu sendiri yang pada akhirnya juga mempengaruhi inflasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh SBIS dan**

Inflasi Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah Periode Januari 2017- Mei 2020”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap transaksi PUAS?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap transaksi PUAS?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh SBIS terhadap transaksi PUAS.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap transaksi PUAS.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat dari segi akademis maupun praktis :

1. Adapun manfaat bagi akademisi adalah :
 - a. Untuk mengetahui secara substansif faktor apa saja yang dapat mempengaruhi transaksi pasar uang antar bank syariah (PUAS).
 - b. Sebagai tambahan kajian dan sumbangan pemikiran.
2. Adapun manfaat bagi praktisi adalah :
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank syariah dalam mengelola dana.
 - b. Sebagai informasi bagi investor atau masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya di perbankan.
 - c. Sebagai bahan referensi penelitian di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pasar Uang

a. Pasar Uang Secara Umum

Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perantara keuangan. Lembaga ini muncul dalam sistem keuangan karena dapat menekan transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian jika proses intermediasi tersebut terganggu, maka akan mempengaruhi sistem keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu bentuk pasar keuangan adalah pasar uang yang dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari satu tahun.¹² Dalam pasar uang, yang ditransaksikan bukanlah uang yang super likuid, akan tetapi yang ditransaksikan adalah sekuritas atau surat berharga, dengan kata lain pasar uang adalah pasar keuangan atau suatu kelompok pasar dimana hanya instrumen utang jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan.¹³

Sedangkan definisi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam buku kebanksentralan pasar uang adalah pasar tempat suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya untuk

¹²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 201.

¹³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), h. 235.

jangka waktu di bawah satu tahun.¹⁴ Jangka waktu pinjaman bisa bervariasi, mulai dari satu hari sampai satu tahun. Maka pinjaman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun digolongkan sebagai pasar hutang. Karakteristik instrumen pasar uang yang memiliki waktu jatuh tempo sangat singkat menunjukkan instrumen ini berisiko rendah dan memiliki likuiditas yang tinggi, yaitu mudah, murah dan cepat jika dikonversikan menjadi dana tunai, sehingga mendekati fungsi uang meskipun kalah likuid dengan uang yang super likuid. Investor yang memiliki kelebihan dana, menyimpan dananya di pasar uang untuk sementara sebagai gudang penyimpanan, sampai ada peluang investasi yang lebih menguntungkan. Bagi pembeli dana (*demand*) pasar uang merupakan sumber dana jangka pendek yang murah, karena instrumen ini dijual dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan tercapainya skala ekonomis yang dapat menekan ongkos transaksi. Karakteristik penjual dana (*supplier*) di pasar uang adalah mereka yang memiliki dana besar yang menganggur untuk jangka waktu yang relatif singkat, sedangkan *demand* dana adalah mereka yang memerlukan dana pinjaman dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang relatif (kurang dari satu tahun).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar uang adalah sarana pinjam meminjam dana jangka pendek di antara peserta pasar yang pada umumnya terdiri atas lembaga keuangan melalui surat berharag jangka pendek. adapun yang diperdagangkan di pasar ini terdiri atas deposito, *commercial paper*, *repurchases agreement*, dan *promissory notes*. Pasar ini pada umumnya berbentuk *over the counter* (OTC) atau elektronik.¹⁵

¹⁴Mahdi Mahmudy, *Pasar Uang Rupiah : Gambaran Umum*, Seri Kebanksentralan No. 15, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), h. 4.

¹⁵Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan : Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), h. 236.

b. Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.¹⁶

Di antara keputusan Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum :

- 1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- 2) Pasar uang yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 yaitu :
 - a) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Ketentuan khusus :

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah : *mudharabah*¹⁷ (*muqradhah/qiradh*); *musyarakah*¹⁸; *qard*¹⁹; *wadi'ah*²⁰; *as-Sharf*²¹.

¹⁶Andri Soemitra, *Bank...*, h. 203.

¹⁷ *Mudharabah* adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan, yaitu akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

- 2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Menurut fatwa DSN MUI No.37/DSN-MUI/2002, pengertian pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 ayat 5 mendefinikan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Dengan demikian, pasar uang antarbank syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah

¹⁸*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999, h. 187.

¹⁹ *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Muhammad Syafi'i Antonio, h. 223.

²⁰*Wadi'ah* berarti titipan yang merupakan akad atau kontrak antara dua pihak yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), cetakan 1, h. 351.

²¹ Ulama Fikih mendefenisikan *sharf* sebagai memperjualbelikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Sutan Remy Sjahdeini, h. 279.

yang telah disepakati sebelumnya.²² Adapun peserta pasar uang yang sesuai prinsip syariah bisa dijalankan oleh bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana atau bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.²³

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa DSN No : 37/ DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut²⁴ :

- 1) Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.
- 2) Dalam rangka peningkatan efisiensi pengolahan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank.
- 3) Untuk memenuhi keperluan itu, dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam transaksi pasar uang antarbank syariah, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya diusahakan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah yang berkedudukan di Indonesia.

Ada persamaan dan perbedaan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Pasar Uang Antarbank

²² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h.213.

²³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 298.

²⁴ *Ibid*, h. 33.

Konvensional (PUAB). Adapun persamaannya sebagai berikut²⁵ :

- 1) Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas baik itu kekurangan maupun kelebihan likuiditas.
- 2) Keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- 1) Pasar uang antarbank syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan pasar uang antarbank konvensional seluruh transaksi berdasarkan suku bunga.
- 2) Peserta pasar uang antarbank konvensional meliputi bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan peserta pasar uang antarbank syariah hanya bank syariah kecuali sebagai pemilik dana.
- 3) Peranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA sedangkan peranti yang digunakan PUAB adalah promes atau *promisary notes*.
- 4) Sertifikat IMA sebagai peranti PUAS hanya dapat dialihkan 1 kali. Sedangkan terhadap promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.
- 5) Dalam perhitungan imbalan peranti PUAS tidak mengikutkan sama sekali perangkat bunga. Di lain pihak bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAB.
- 6) Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAB.

²⁵Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta, Kencana : 2004), h. 112.

- 7) Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali. Sedangkan *promes* merupakan suatu *negoitable instrument* dimana para pihak tidak dibatasi dalam menegoisasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

2. Fungsi Pasar Uang

Secara umum pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan nonkeuangan, dan peserta lainnya baik dalam rangka kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Dan sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka (*open market operation*) melalui sertifikat bank indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SPBU). Dimana SBI untuk kontraksi moneter dan SPBU ekspansi moneter.²⁶

Namun jika lebih dirincikan lagi ada beberapa fungsi pasar uang yang berkaitan erat dengan dunia perbankan dan moneter yaitu²⁷ :

- a. Fungsi likuiditas, semua pihak termasuk perusahaan, lembaga keuangan dan masyarakat dapat menggunakan pasar uang untuk keperluan mengelola *cash flow* sekaligus memperoleh pendapatan.
- b. Fungsi kebijakan, otoritas moneter atau bank sentral dengan menggunakan piranti pasar uang, mekanisme pasar uang, maupun peserta pasar uang dapat melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan melalui operasi pasar terbuka (OPT) dan fasilitas lain yang disediakan Bank Sentral untuk peserta pasar uang. Dengan demikian Bank Sentral melalui OPT dapat mempengaruhi pasar uang demi demi pencapaian target

²⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, h. 236.

²⁷Veithzal Rivai, dkk, *Financial Institution Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). H. 4.

- akhir (*ultimate target*) yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pertumbuhan pendapatan nasional, inflasi, kesempatan kerja, dan stabilisasi neraca pembayaran.
- c. Sementara itu bagi bank umum fungsi pasar uang adalah untuk memelihara aset dalam bentuk *secondary reserve* (cadangan sekunder) untuk memenuhi kewajiban yang segera dibayar, mengendalikan likuiditas sehingga mencapai *cash ratio* yang optimal, dan memperoleh laba dari transaksi pasar uang.
 - d. Fungsi informasi, yaitu pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku para peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri.

3. Tujuan Pasar Uang

Dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Adapun pihak yang terlibat dalam pasar uang, yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank maupun perusahaan non bank yang membutuhkan dana yang harus segera dipenuhi untuk keperluan tertentu. Yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi di pasar uang.²⁸

Bagi pihak yang membutuhkan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang terdapat beberapa tujuan²⁹:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo.

²⁸Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 192.

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2009), h. 208.

- 2) Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya.
- 4) Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi di lembaga kliring dan harus dibayar.

Sedangkan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar uang, berikut tujuannya³⁰ :

- 1) Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan.
- 2) Bermaksud membantu bagi pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
- 3) Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dalam kondisi ekonomi tertentu (motif ini tidak diakui oleh Islam).

4. Indikator Yang Mempengaruhi Pasar Uang

Pasar uang merupakan transaksi yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, bank sentral, bank komersil dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Dengan banyaknya pihak yang ikut terlibat dalam transaksi pasar uang ini, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya dalam kegiatan ekonomi. Secara umum ada beberapa indikator yang mempengaruhi pasar uang³¹ yaitu :

- a. BI rate merupakan indikasi level suku bunga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.
- b. JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) adalah suku bunga indikasi penawaran transaksi pasar uang antarbank (PUAB) di Indonesia yang berasal dari suku bunga

³⁰ *Ibid.*

³¹ R. Serfianto D. Purnomo dkk, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 98.

- penawaran bank-bank pelapor yang ditetapkan oleh BI sebagai kontributor JIBOR.
- c. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus sehingga dapat menurunkan nilai mata uang suatu negara.
 - d. Kurs mata uang adalah harga mata uang dari suatu negara yang diukur, dibandingkan, dan dinyatakan dalam nilai mata uang negara lainnya.
 - e. Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu.
 - f. Suku bunga PUAB (dalam rupiah) yaitu tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah di pasar uang antar bank
 - g. Volume transaksi PUAB (dalam rupiah) yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah yang terjadi di pasar uang antar bank (PUAB)
 - h. Suku bunga PUAB (dalam dolar AS/US\$) yaitu tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk dolar AS/US\$ di pasar uang antar bank (PUAB).
 - i. Volume transaksi PUAB (dalam dolar AS/US\$) yaitu jumlah transaksi antar bank dalam pinjam-meminjam dana dalam bentuk dolar AS (US\$) yang terjadi di pasar uang antar bank.
 - j. Suku bunga deposito rupiah (% per tahun) yaitu tingkat bunga deposito yang ditetapkan oleh masing-masing bank kepada para nasabah deposan yang menandatangani uangnya dalam bentuk rupiah.
 - k. Suku bunga deposito dolar AS/US\$ (% per tahun) yaitu tingkat suku bunga deposito yang ditetapkan oleh masing-masing bank kepada para nasabah deposan yang menandatangani uangnya dalam bentuk dolar AS (US\$).

- l. Suku bunga kredit (% per tahun) yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para nasabah kredit (debitur).
- m. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi berjangka pendek yang bebas risiko.

Meskipun pada umumnya indikator yang mempengaruhi pasar uang sangat banyak seperti yang tercantum di atas, namun untuk menghindari pembahasan yang sangat luas dalam penelitian ini indikator atau variabel yang mempengaruhi hanya menggunakan sedikit variabel yaitu SBIS dan inflasi. Hal ini juga dikarenakan variabel yang dipengaruhi bukan pasar uang secara umum. Akan tetapi pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip syariah atau disingkat dengan PUAS. PUAS merupakan instrumen dari pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk lebih memperjelas pembahasan mengenai variabel yang mempengaruhi penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan sebagai berikut.

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI mengenai *wadi'ah* yang telah dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang

Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menentukan sebagai berikut :

Pertama : ketentuan umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

Kedua : ketentuan hukum

- 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- 2) Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
- 3) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- 4) Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Ketiga : ketentuan akad

- 1) Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad :
 - a) Mudharabah (muqaradhadh) / qiradh
 - b) Musyarakah
 - c) Ju'alah
 - d) Wadi'ah
 - e) Qard
 - f) wakalah
- 2) Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.³² Sebagai instrumen pengendalian moneter SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Bank Indonesia

³² Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 298.

wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Bank syariah boleh memanfaatkan dananya yang belum digunakan kepada sektor riil.

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad mudharabah, musyarakah, ju'alah, wadi'ah, qardh, wakalah. Saat ini SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS dan UUS. BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan / atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.³³

b. Inflasi

1) Pengertian inflasi

Pada mulanya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam sebuah perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat yang diduga telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi dapat juga diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penawaran agregat.³⁴

Dalam pengertian yang lain inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang atau jasa yang harganya naik atau ada barang atau jasa yang harganya turun, namun ada juga barang atau jasa yang harganya tetap. Sedangkan menurut Boediono dalam buku *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan* inflasi adalah

³³Andri Soemitra, *Bank...*, h. 217.

³⁴Mc Eachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 133.

kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus.³⁵ Defenisi ini sejalan dengan defenisi yang dikemukakan Suseno dan Siti Aisyah, inflasi secara singkat dapat didefenisikan sebagai kecenderungan menaikannya harga-harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus.³⁶

Dengan demikian dapat kita ambil tiga aspek yang terkandung dalam defenisi inflasi yaitu kecenderungan kenaikan harga-harga, bersifat umum, dan berlangsung secara terus menerus. Inflasi memiliki makna adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan tingkat harga sebelumnya, tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan waktu sebelumnya tetapi tetap dalam kecenderungan yang meningkat. Jika kenaikan harga hanya berlaku pada satu komoditi dan kenaikan itu tidak akan mendorong naiknya harga-harga komoditi lainnya, maka gejala ini tidak dapat digolongkan sebagai inflasi karena kenaikan tersebut tidak bersifat umum. Tetapi jika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka hampir bisa dipastikan harga-harga komoditas lainnya bisa dipastikan naik. Artinya dengan naiknya harga BBM maka tarif angkutan akan naik dan mendorong naiknya biaya produksi yang kemudian akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa lainnya. Meskipun kenaikan bersifat umum namun jika hanya terjadi sesaat belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Untuk itu biasanya perhitungan inflasi dalam rentang waktu satu bulan, triwulan, semester dan tahunan.

Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari

³⁵M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), h. 253.

³⁶Suseno dan Siti Aisyah, *Inflasi* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Seri Kebansentralan No. 22, 2009), h. 2-3.

waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008 paket barang dan jasa dalam IHK telah dilakukan atas dasar survey biaya hidup (SBH) tahun 2007 yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS). Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa secara bulanan dari beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa di setiap kota.³⁷

2) Penyebab terjadinya inflasi

Secara umum inflasi di Indonesia dapat disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, baik dari sisi permintaan, penawaran maupun ekspektasi. Meskipun demikian kontribusi masing-masing faktor dalam mempengaruhi inflasi tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Artinya, faktor utama yang mempengaruhi inflasi bisa berbeda dari waktu ke waktu. Fenomena unik yang terjadi di Indonesia ketika inflasi terjadi sering diakibatkan distorsi dan spekulasi, bukan mekanisme masalah pasokan dan permintaan. Padahal jika mengacu pada hukum ekonomi, maka kenaikan harga terjadi jika pasokan berkurang, sementara permintaan tetap, pasokan tetap, sementara permintaan naik, dan kombinasi dari pasokan yang berkurang dan permintaan naik. Kadang-kadang harga produk kebutuhan di pasar tiba-tiba naik walaupun pasokan dan permintaan normal. Hal ini sering disebut kejadian tidak normal karena distorsi dan spekulasi.

3) Dampak inflasi terhadap perekonomian

Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau berwujud sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah,

³⁷<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/contents/Default.aspx>, diakses tanggal 31 Maret 2015.

misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama dan Manurung dalam buku ekonomi makro islam karya Nurul Huda, dkk :

a) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, sehingga inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

b) Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan mengalami kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Seperti yang dijelaskan di atas akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara umum tingkat pendapatannya juga akan menurun. Meskipun inflasi memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian, akan tetapi dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat

dijadikan cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya.³⁸

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengaliran dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Dengan demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.

Dampak lainnya dirasakan pula oleh penabung, kreditur atau debitur dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.³⁹

4) Kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan.⁴⁰ Pada umumnya besaran moneter meliputi uang primer (M0), uang beredar dalam artian sempit (M1), dan uang beredar dalam artian luas (M2). Sementara itu tujuan kebijakan moneter meliputi terjaganya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi),

³⁸Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), h. 142.

³⁹Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 180.

⁴⁰ Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan : teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 61.

membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), dan cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang melaksanakan kebijakan moneter memiliki tujuan utama yang harus dicapai. Tujuan utama yang ingin dicapai Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang tercantum dalam UU No.3 tahun 2004, Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah salah satunya tampak pada kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa sebagai dampak dari inflasi. Untuk mencapai tujuan ini sejak tahun 2005 Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utamanya (*inflation targetin framework/ ITF*) diikuti dengan sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Stabilitas nilai tukar ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar yang mampu mengurangi gejolak atau volatilitas nilai tukar yang berlebihan, namun tidak untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkat level tertentu.⁴¹

Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking* artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam hal ini kebijakan moneter juga ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI rate) yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga

⁴¹Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Lembaga Keuangan non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h. 38.

deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).⁴²

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Salah satu tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuan itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang mencakup Operasi pasar terbuka, penetapan giro wajib minimum, penetapan BI rate, penetapan kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan peran sebagai *the lender of the last resort*.

5) Inflasi menurut Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah *dinar* dan *dirham*, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan dalam islam.⁴³ Penurunan *dinar* atau *dirham* dapat mungkin

⁴²<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan>, diakses tanggal 21 Oktober 2015, 16:12 WIB.

⁴³Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana 2009) h. 189

terjadi yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Salah seorang ekonom muslim (Al-Maqrizi) membuat klasifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua jenis, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Menurut al-Maqrizi inflasi karena faktor alamiah terjadi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan permintaan terhadap barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi dan jauh dari daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi karena kesalahan manusia dapat terjadi akibat tiga hal yaitu korupsi dan kesalahan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang.⁴⁴

5. Hubungan SBIS dan Inflasi terhadap Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar uang antarbank syariah merupakan salah satu instrumen pasar uang dengan prinsip syariah. Mekanismenya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya fasilitas pasar uang antarbank syariah, diharapkan bank-bank syariah menjadi lebih mudah dalam mengelola likuiditasnya, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Karena sama halnya dengan bank konvensional bank syariah juga perlu

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed,3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 425.

transaksi di pasar uang untuk memanfaatkan dana yang menganggur atau sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

Inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pasar, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat adalah ekspektasi terhadap laju inflasi di masa yang akan datang. Ekspektasi para pelaku ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang akaibat adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah.⁴⁵ Inflasi yang tinggi, menyebabkan hasrat masyarakat untuk menabung menjadi menurun atau lebih terdorong untuk menggunakan uangnya dengan berkonsumsi dan berspekulasi di sektor barang dan jasa. Sehingga kemampuan suatu bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan adanya pasar uang antar bank maka diharapkan bank yang mengalami hal seperti ini akan terbantu.

Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, pengendalian suku bunga jangka pendek di pasar uang antar bank sangat penting sebagai arah kebijakan moneter yang selanjutnya ditransmisikan suku bunga jangka menengah dan panjang. Kebijakan moneter yang diambil melalui pasar terbuka akan mempengaruhi berbagai tingkat suku bunga dan imbal hasil di pasar uang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap variabel makro ekonomi seperti nilai tukar, konsumsi, investasi dan pada akhirnya berdampak pada tingkat inflasi.

Operasi pasar terbuka merupakan upaya pencapaian target kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara tidak langsung. Operasi pasar terbuka berbentuk jual beli surat berharga oleh Bank Indonesia dengan mekanisme lelang maupun non lelang. Pelaksanaan operasi moneter syariah dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil dalam transaksi pasar uang antarbank syariah. Sedangkan transaksi pasar uang antarbank syariah akan

⁴⁵ Suseno dan Siti Aisyah, *Inflasi*, (Jakarta :PPSK Bank Indonesia, Seri Kebanksentralan No. 22, 2009), h. 16

mempengaruhi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Seperti yang kita ketahui pembiayaan bank syariah sangat berpengaruh kepada sektor riil, dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi inflasi.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah antara SBIS dan inflasi terhadap transaksi PUAS. Dimana, dalam rangka pencapaian target kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka dan operasi pasar terbuka syariah dengan instrumen SBIS akan mempengaruhi tingkat imbal hasil pada transaksi pasar uang antarbank syariah, dan transaksi pasar uang antar bank syariah akan berpengaruh terhadap pembiayaan dalam sektor riil sehingga dapat mempengaruhi inflasi yang merupakan sasaran kebijakan moneter. Sedangkan inflasi merupakan variabel makro yang sangat mungkin mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti transaksi pasar uang antarbank syariah.

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Husni Mubarak (2011) tentang “*Analisis Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terhadap Financing to Deposits Ratio (FDR) serta Implikasinya kepada Return On Assets Bank Syariah di Indonesia*” menyimpulkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR sedangkan SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR Bank syariah. Variabel SBIS, PUAS dan FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank syariah.
2. Hasil penelitian Dini Hasanah (2011) yang berjudul “*Analisis Efektivitas Jalur Pembiayaan dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia dengan Metode VAR/VECM*”, menyimpulkan : berdasarkan hasil uji IRF membuktikan pola hubungan satu arah SBIS

terhadap PUAS positif, PUAS terhadap pembiayaan negatif, pembiayaan terhadap produksi industri positif, dan produksi industri terhadap inflasi positif.

3. Hasil penelitian Fitri Amalia (2014) yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah, JUB Dan PDB Terhadap SBI Syariah Periode 2003-2013 Dengan Pendekatan VECM*”, menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) hanya dipengaruhi oleh pembiayaan perbankan syariah. Dalam jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dipengaruhi oleh pembiayaan perbankan syariah dan Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Penelitian Rafikha Rustianah Mustafidan yang berjudul “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, tujuan penelitiannya adalah untuk melihat pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA, ROE, NIM, Penempatan pada SBIS dan PUAS terhadap likuiditas yang difroksikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa DPK, NPF, CAR, ROA, ROE, NIM, Penempatan pada SBIS dan PUAS terbukti berpengaruh simultan secara signifikan pada FDR, sedangkan pengujian secara *parsial* DPK, NPF, CAR, ROA, ROE dan SBIS berpengaruh secara signifikan terhadap FDR, sedangkan NIM dan PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian di atas adalah :

1. Dalam penelitian terdahulu yang pertama variabel yang dipengaruhi adalah FDR yang mengarah ke ROA, dan dipengaruhi oleh SBIS, Inflasi dan PUAS, dalam penelitian saya PUAS adalah variabel yang dipengaruhi sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan dipengaruhi oleh inflasi dan SBIS.
2. Penelitian terdahulu yang kedua sangat jelas terlihat perbedaannya karena fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah transmisi kebijakan moneter dari SBIS-PUAS-pembiayaan-produksi industri-inflasi, namun

penelitian ini memiliki metode yang berbeda yaitu regresi linier berganda

3. Penelitian terdahulu yang ketiga variabel yang dipengaruhi adalah SBIS yang dalam jangka panjang dari hasil penelitian dipengaruhi oleh pembiayaan perbankan syariah dan PDB.
4. Penelitian terdahulu yang keempat memang berbeda dengan penelitian saya, baik dari segi variabel maupun metode penelitian, tetapi karena yang dipengaruhi atau variabel dependent dalam penelitian ini adalah likuiditas menurut saya cukup berkaitan dengan penelitian saya karena transaksi PUAS adalah membantu masalah likuiditas bank syariah.

Dalam penelitian ini saya mengasumsikan bahwa seluruh variabel dapat saling mempengaruhi, dan pentingnya mengetahui permasalahan PUAS diteliti karena PUAS merupakan salah satu instrumen yang membantu perbankan yang kesulitan dalam hal likuiditas, dengan demikian diharapkan transaksi PUAS perbankan syariah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu yang dampaknya akan dirasakan juga pada pendapatan di sektor riil yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis merupakan sebuah bentuk bagan pemikiran yang menggambarkan situasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, sehingga fokus penelitian dapat terlihat jelas. Judul dalam penelitian ini adalah “*Pengaruh SBIS dan inflasi terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS)*”. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependent) dan dua variabel bebas (independent). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS), sedangkan variabel bebas dalam

SBIS memiliki hubungan negatif dengan transaksi pasar uang antarbank syariah. Ketika tingkat imbal hasil transaksi pasar uang antarbank syariah lebih menguntungkan maka dana yang semulanya akan ditempatkan pada SBIS akan dialihkan

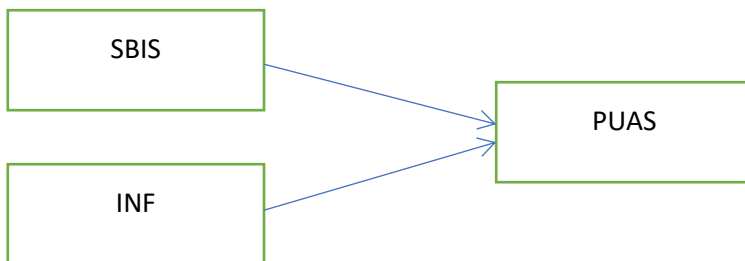
pada transaksi pasar uang antarbank syariah. Sebaliknya Bank Indonesia akan menguapayakan tingkat imbal hasil lebih tinggi pada SBIS maka dana yang seharusnya ditransaksikan pada pasar uang antarbank syariah akan beralih kepada SBIS yang dianggap lebih aman.

Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah. Tingkat inflasi akan mempengaruhi tingkat likuiditas yang ada pada bank umum, karena pergerakan tingkat bunga yang dipicu oleh tekanan laju inflasi akan mempengaruhi investasi dan pengalokasian dana termasuk di sektor perbankan. Dalam kondisi seperti ini Bank Indonesia akan menetapkan kebijakan moneter melalui suku bunga. Dengan demikian pengendalian moneter yang salah satunya SBIS akan berpengaruh terhadap tingkat imbal hasil transaksi pasar uang antarbank syariah. Semakin tinggi inflasi maka transaksi pasar uang antar bank syariah akan menurun.

Semua variabel independent memiliki hubungan dengan variabel dependent.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah

INF : Inflasi

PUAS : Pasar Uang Antarbank Syariah

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu telah terjadi atau yang akan terjadi.⁴⁶ Hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap sesuatu yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam penelitian, namun kebenarannya masih diragukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₀: Tidak terdapat pengaruh SBIS terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS).
- H₁: Terdapat pengaruh SBIS terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS).
- H₀: Tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS).
- H₂: Terdapat pengaruh inflasi terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS)
- H₀: Tidak terdapat pengaruh SBIS dan inflasi terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS).
- H₃: Terdapat pengaruh SBIS dan inflasi terhadap transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS)

⁴⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 59.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis.⁴⁷

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh data SBIS, inflasi dan PUAS dari Januari tahun 2017- Mei tahun 2020 dengan menggunakan data bulanan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder runtun waktu (time series) yaitu data data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.⁴⁸ Yang mana data ini diperoleh dari Bank Indonesia yang diakses melalui situs www.bi.go.id. Data yang diperlukan adalah data SBIS, Inflasi dan PUAS, yang dikumpulkan dari Januari 2017 sampai Mei 2020.

D. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih spesifik dari suatu konsep. Tujuannya untuk mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefenisikan konsepnya, sehingga tidak terjadinya pengertian ganda atau perluasan makna. Berikut beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

⁴⁷Sujoko Efferin dkk, *Metode Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 47.

⁴⁸Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 146.

1. SBIS

a. Defenisi Konseptual

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁹

Sebagai instrumen pengendalian moneter SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Bank syariah boleh memanfaatkan dananya yang belum digunakan kepada sektor riil.

b. Defenisi Operasional

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang disingkat SBIS dalam penelitian ini adalah SBIS secara keseluruhan yaitu dalam jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan. Data SBIS diakses dari website Bank Indonesia dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada bagian ke III nomor 1 yaitu Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar Uang.

2. Inflasi

a. Defenisi Konseptual

Inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus.⁵⁰ Dengan demikian ada tiga konsep yang terkandung dalam

⁴⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 298.

⁵⁰Suseno dan Siti Aisyah, *Inflasi* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Seri Kebansentralan No. 22, 2009), h. 2-3.

pengertian inflasi yaitu kecenderungan kenaikan harga-harga, bersifat umum, dan berlangsung secara terus menerus.

Salah seorang ekonom muslim (Al-Maqrizi) membuat klasifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua jenis, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Menurut al-Maqrizi inflasi karena faktor alamiah terjadi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan permintaan terhadap barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi dan jauh dari daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi karena kesalahan manusia dapat terjadi akibat tiga hal yaitu korupsi dan kesalahan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang.⁵¹

b. Defenisi Operasional

Secara operasional inflasi dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Konsumen yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Data inflasi diakses dari website Badan Pusat Statistik dalam publikasi Ekonomi dan Perdagangan.

3. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

a. Defenisi Konseptual

Pasar uang antar bank syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian penanam dana dengan pengelola dana untuk

⁵¹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed,3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 425.

melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵²

b. Defenisi Operasional

Defenisi operasional transaksi pasar uang antarbank syariah yang disingkat PUAS dalam penelitian ini adalah transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan. Data PUAS diakses dari website Bank Indonesia dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada bagian ke III nomor 1 yaitu Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar Uang.

E. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran umum untuk profil dari sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal⁵³. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian

⁵² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h.213.

⁵³ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.160

normalitas dengan analisis grafik dapat dengan melihat grafik histogram dan normal P-P Plot.

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram histogram dimana dasar pengambilan keputusan adalah apabila grafik histogram tidak condong ke kiri dan ke kanan maka data penelitian berdistribusi normal, dan sebaliknya.

Sedangkan cara menguji normalitas dengan uji statistik adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi residual. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai sig. atau probabilitas $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai sig. atau probabilitas $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen⁵⁴. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi

⁵⁴ Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.105

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas⁵⁵. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya)⁵⁶. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya autokorelasi, maka salah satu caranya adalah menggunakan uji Durbin Watson (DW test).

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan

⁵⁵ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.139

⁵⁶ *Ibid*, h. 110

adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.⁵⁷

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

3. Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan penerapan uji persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun rumus yang digunakan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = PUAS

b_1 = Koefisiensi Regresi SBIS

b_2 = Koefisiensi Regresi Kesadaran INF

X_1 = PUAS

X_2 = SBIS

α = Bilangan Konstanta

e = Error yang ditolerir (5%)

⁵⁷ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h.111

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F).

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁵⁸

Insukindro menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya, bisa suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi regresi linear asumsi klasik, misalnya, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik.⁵⁹

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

1. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai Sig. $t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

⁵⁸ Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4 (Jakarta: Erlangga, 2013) h. 247

⁵⁹ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.97

2. Jika nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan nilai $\text{Sig. } t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

1. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan nilai $\text{Sig. } F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ dan nilai $\text{Sig. } F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun variabel yang harus dideskripsikan dalam penelitian ini adalah SBIS, INF dan PUAS.

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menyebutkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.⁶⁰

SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.⁶¹ Sebagai instrumen pengendalian moneter SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ju'alah*, *wadi'ah*, *qardh*, *wakalah*. Saat ini SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS dan UUS. BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan / atau

⁶⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 353.

⁶¹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 298.

melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.⁶²

Tabel IV.1
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (dalam miliar rupiah)

<div>Tahun Bulan</div>	2017	2018	2019	2020
Januari	11.878	12.272	10.895	11.107
Februari	12.683	12.717	12.725	11.522
Maret	12.273	12.997	14.415	11.765
April	11.533	13.737	13.849	11.705
Mei	10.446	12.807	14.124	11.410
Juni	9.421	11.967	13.604	
Juli	10.966	11.312	12.989	
Agustus	11.716	10.312	11.534	
September	12.626	10.642	11.394	
Oktober	11.555	8.967	9.045	
November	10.387	8.525	9.600	
Desember	10.017	8.215	10.436	

Sumber : www.bi.go.id

b. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam sebuah perekonomian, hal ini mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat yang diduga telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga. Dengan demikian inflasi dapat dikatakan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penawaran

⁶²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2009), h. 217.

agregat.⁶³ Atau lebih sederhana lagi, inflasi merupakan kecenderungan menaiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus.⁶⁴

Perkembangan inflasi dapat dilihat dari lembaga-lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun lembaga lain yang menerbitkan perkembangannya. Namun lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan inflasi saat ini adalah Badan Pusat Statistik. Inflasi dalam penelitian ini adalah inflasi yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik yaitu bps.go.id.

Tabel IV.2. Data Inflasi (dalam persen)

Tahun Bulan	2017	2018	2019	2020
Januari	3,49	3,25	2,82	2,68
Februari	3,83	3,18	2,57	2,98
Maret	3,61	3,40	2,48	2,96
April	4,17	3,41	2,83	2,67
Mei	4,33	3,23	3,32	2,19
Juni	4,37	3,12	3,28	
Juli	3,88	3,18	3,32	
Agustus	3,82	3,20	3,49	
September	3,72	2,88	3,39	
Oktober	3,58	3,16	3,13	
November	3,30	3,23	3,00	
Desember	3,61	3,13	2,72	

Sumber : www.bi.go.id

⁶³Mc Eachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 133.

⁶⁴Suseno dan Siti Aisyah, *Inflasi* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Seri Kebansentralan No. 22, 2009), h. 2-3.

c. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Menurut fatwa DSN MUI No.37/DSN-MUI/2002, pengertian pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, memberikan definisi PUAS yang lebih teknis, yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶⁵ Adapun peserta pasar uang yang sesuai prinsip syariah bisa dijalankan oleh bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana atau bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.⁶⁶

Pasar uang yang dibolehkan dalam prinsip syariah hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari riba nasi'ah karena kerugian atau bahaya dari bunga lebih besar dari keuntungan atau mashlahahnya. Selain itu Islam melarang adanya jual beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.

**Tabel IV.3. Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah
(dalam miliar rupiah)**

Tahun Bulan	2017	2018	2019	2020
Januari	866	13	241	613
Februari	150	1.221	383	985
Maret	1.605	787	1.394	347
April	1.120	1.092	838	142
Mei	345	788	768	682
Juni	1.158	928	1.165	
Juli	175	718	595	

⁶⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 4.

⁶⁶Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 298.

Agustus	172	1.037	687	
September	699	2.360	1.397	
Oktober	589	526	200	
November	893	945	722	
Desember	800	1.157	855	

Sumber : www.bi.go.id

2. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melakukan proses penyeleksi data (*screening data*), sehingga data-data yang dianalisis memiliki distribusi normal. Data yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum dan maksimum dari setiap variabel yang diteliti, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Pada Tabel IV.4 berikut dapat dilihat statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	41	2.19	4.37	3.2661	.47449
SBIS	41	8215	14415	11514.39	1521.213
PUAS	41	13	2306	758.44	463.425
Valid N (listwise)	41				

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Jumlah data penelitian (N) adalah 41 observasi. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar yang bervariasi.

1. PUAS (Y) memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 2306. Nilai rata-rata sebesar 758,44 dengan nilai standar deviasi sebesar 463,425.
2. Inflasi (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2,19 dan nilai maksimum sebesar 4,37. Nilai rata-rata sebesar 3,2661 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,47449.
3. SBIS memiliki nilai minimum sebesar 8215 dan nilai maksimum sebesar 14415. Nilai rata-rata sebesar

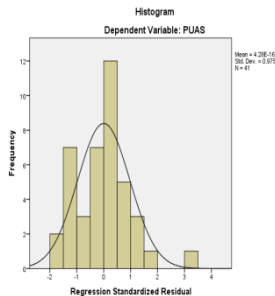
11514,39 dengan nilai standar deviasi sebesar 1521,213.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Hasil Uji Normalitas

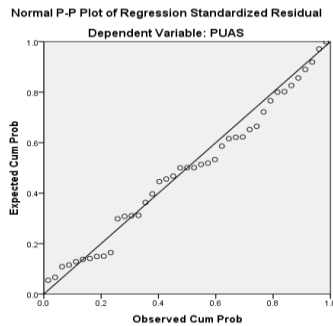
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil analisis grafik terlihat pada Gambar IV.1 dan Gambar IV.2 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel IV.5 sebagai berikut:



Gambar IV.1. Histogram

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar IV.1. diatas dapat dilihat bahwa histogram menunjukkan pola terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari pola kurva yang tidak menceng ke kiri ataupun menceng ke kanan sehingga dapat disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola terdistribusi secara normal.



Gambar IV.2. Normal P-P Plot

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar IV.2. diatas dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Titik-titik menyebar disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel IV.5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	457.76533196
	Absolute	.087
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.558
Asymp. Sig. (2-tailed)		.914

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas menunjukkan hasil dari analisis *Kolmogorov-Smirnov Z*, menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,914 dimana nilainya lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Asymp. Sig. = 0,914 > 0,05) maka data tersebut terdistribusi secara normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Inflasi	.988	1.012
SBIS	.988	1.012

a. Dependent Variable: PUAS

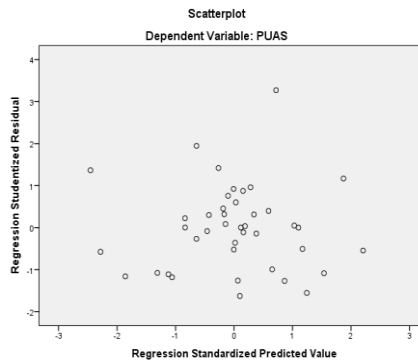
Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Inflasi dan SBIS) memiliki *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan analisis grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar IV.3 berikut ini:



Gambar IV.3. Grafik *Scatterplot*

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar IV.3. diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur serta titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda ada terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.641 ^a	.411	.356	.08848	1.693

a. Predictors: (Constant), SBIS, Inflasi

b. Dependent Variable: PUAS

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,693 dan nilai du (cari pada tabel Durbin Watson) diperoleh nilai sebesar 1,653. Nilai DW sebesar 1,693 lebih besar dari batas atas (du) sebesar 1,653 dan kurang dari $(4-du)$ $4-1,653 = 2,347$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan penerapan uji persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1171.362 + 0,006X_1 - 148,633X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

1. Apabila PUAS (Y) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka SBIS (X_1) akan mengalami peningkatan sebesar 0,006. Artinya adalah jika PUAS mengalami peningkatan maka hal itu merupakan bagian dari peningkatan SBIS.
2. Apabila PUAS (Y) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Inflasi (X_2) akan mengalami penurunan sebesar 148,633. Artinya adalah jika PUAS mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya Inflasi.

c. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F).

1. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV.8 Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.463	.413	.33724

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) mempunyai nilai sebesar 0,681 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 68,1%. Artinya koefisien pengaruh SBIS dan Inflasi mempunyai hubungan yang cukup terhadap PUAS, karena diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 68,1%.

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mempunyai nilai sebesar 0,413. Artinya sebesar 41,3% faktor-faktor dari PUAS dapat dijelaskan oleh variabel SBIS dan Inflasi. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 58,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1171.362	808.436		1.449	.156
1 Inflasi	-148.633	157.457	-.152	-2.175	.037
SBIS	.006	.049	.021	.128	.899

a. Dependent Variable: PUAS

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel. Nilai t tabel diperoleh dengan $k = 3$, $n = 41$ dan $df = n - k$ ($41 - 3 = 38$) sehingga diperoleh t tabel = 2,042. Dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- Nilai t hitung untuk SBIS adalah 0,128 dengan tingkat signifikansi 0,899 maka variabel SBIS tidak berpengaruh terhadap PUAS dengan nilai t hitung $(0,128) < t$ tabel $(2,042)$ dan nilai signifikan $(0,899) > 0,05$.
- Nilai t hitung untuk Inflasi adalah (-2,175) dengan tingkat signifikansi 0,037 maka variabel Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PUAS dengan nilai t hitung $(-2,175) > t$ tabel $(2,042)$ dan nilai signifikan $(0,037) < 0,05$.

3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel IV.10 berikut:

Tabel IV.10 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.144	3	1.048	9.215	.000 ^b
Residual	3.639	32	.114		
Total	6.784	35			

a. Dependent Variable: PUAS

b. Predictors: (Constant), SBIS, Inflasi

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil analisis ini diperkuat dengan mencari nilai F tabel dengan nilai $df (n1) = 2$, $df (n2) = 38$, dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,32. Nilai F hitung $(9,215) > F \text{ tabel } (3,32)$ dan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen (SBIS dan Inflasi) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PUAS).

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel, SBIS dan Inflasi sebagai variabel bebas serta PUAS sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data dokumentasi di Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PUAS (Pasar Uang Antarbank Syariah). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa SBIS (x_1) sebesar 0,006. Artinya jika SBIS mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan volume pembiayaan bank syaria'ah sebesar Rp 0,006 juta.

Lain halnya dengan variabel Inflasi memengaruhi PUAS. Hal ini disebabkan karena dengan tinggi nya Inflasi maka akan mempengaruhi masyarakat dalam berkonsumsi, maka dengan tingginya inflasi akan menurunkan PUAS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, INF (x_2) sebesar 148,633 Artinya jika INF mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan PUAS Rp 148.633 juta.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hipotesis secara parsial variabel SBIS H_a ditolak dan variabel Inflasi H_a diterima. Namun, secara bersama-sama variabel SBIS dan Inflasi memengaruhi PUAS.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Besarnya pengaruh SBIS (X_1) terhadap PUAS jika terjadi kenaikan 1% pada jumlah penduduk maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp 0,006 juta. Secara parsial variabel SBIS (X_1) memiliki nilai *p-value* $0,899 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Sedangkan $t_{hitung} 0,128 < 2,042$ dari t_{tabel} artinya tidak signifikan. Maka SBIS secara parsial tidak berpengaruh terhadap PUAS.

Begitu juga dengan variabel Inflasi (X_2) jika terjadi kenaikan 1% maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp 148,633 juta. Secara parsial memiliki nilai *p-value* $0,037 < 0,05$ artinya signifikan. Sedangkan $t_{hitung} -2,175 > 2,042$ dari t_{tabel} artinya signifikan. Maka Inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap PUAS.

Secara serempak (simultan) variabel SBIS dan Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah di Sumatera Utara berdasarkan uji F-test dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,215 > 3,32$), sedangkan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis (H_a) terbukti, artinya semakin meningkat SBIS dan Inflasi bersama-sama maka akan meningkatkan PUAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Jangka waktu dalam penelitian ini adalah 5 tahun 6 bulan, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan

jangka waktu yang lebih lama, agar hasil penelitiannya lebih akurat dalam hal jangka panjang.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih banyak sebagai variabel dependent yang mempengaruhi pasar uang antarbank syariah.
3. Karena keterbatasan pengetahuan tentang pasar uang syariah, diharapkan kepada praktisi dan akademisi ekonomi syariah lebih mensosialisasi pembahasan tentang pasar uang syariah.
4. Bagi pihak otoritas moneter diharapkan lebih menekankan peran moneter dalam pengendalian inflasi dan nilai tukar rupiah mengingat indonesia baru saja mengalami keterpurukan ekonomi dalam hal nilai tukar rupiah.
5. Bagi bank syariah maupun bank konvensional diharapkan mampu mengelola likuiditas dan memanfaatkan instrumen moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Anggota IKAPI, *Lima Undang-undang Moneter dan Perbankan*, Bandung : Fokus Media, 2009

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah :Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Azkia Publisher, 2009.

Booklet Perbankan Indonesia 2014, Jakarta, Edisi 1 Maret 2014.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta, Kencana : 2004.

Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan “teori dan aplikasi”*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2014

Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : Kencana, 2008

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank : Modul Sertifikasi Tingkat I* Jakarta : Gramedia, 2013

Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed,3 Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2009

Mahmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010

Mangani, Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Erlangga, 2009

Marliyah, “*Pengaruh Inflasi dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah*,” dalam Taqaddum (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam), Vol. II, No.1 Jan-Des 2014.

Mc Eachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* Jakarta: Salemba Empat, 2000

Natsir, M. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 4.

Pohan, Aulia. Potret Kebijakan Moneter Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Purnomo, Serfianto D. dkk. *Pasar Uang dan Pasar VALAS*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013

Putong, Iskandar *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking “sebuah teori, konsep dan aplikasi”*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010

Rivai, Veithzal dkk, *Financial Institution Management*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

Soemitra,Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 1 Jakarta : Kencana, 2009

SP, Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Lembaga Keuangan non Bank di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014

Lampiran 1

TABULASI DATA

Bulan / Tahun	SBIS (miliar rupiah)	Inflasi (persen %)	PUAS (miliar rupiah)
Januari 2017	11.878	3.49	866
Februari 2017	12.683	3.83	150
Maret 2017	12.273	3.61	1.605
April 2017	11.533	4.17	1.120
Mei 2017	10.446	4.33	345
Juni 2017	9.421	4.37	1.158
Juli 2017	10.966	3.88	175
Agustus 2017	11.716	3.82	172
September 2017	12.626	3.72	699
Oktober 2017	11.555	3.58	589
November 2017	10.387	3.30	893
Desember 2017	10.017	3.61	800
Januari 2018	12.272	3.25	13
Februari 2018	12.717	3.18	1.221
Maret 2018	12.997	3.40	787
April 2018	13.737	3.41	1.092
Mei 2018	12.807	3.23	788
Juni 2018	11.967	3.12	928
Juli 2018	11.312	3.18	718
Agustus 2018	10.312	3.20	1.037
September 2018	10.642	2.88	2.360
Oktober 2018	8.967	3.16	526
November 2018	8.525	3.23	945
Desember 2018	8.215	3.13	1.157
Januari 2019	10.895	2.82	241
Februari 2019	12.725	2.57	383
Maret 2019	14.415	2.48	1.394
April 2019	13.849	2.83	838
Mei 2019	14.124	3.32	768
Juni 2019	13.604	3.28	1.165

Juli 2019	12.989	3.32	595
Agustus 2019	11.534	3.49	687
September 2019	11.394	3.39	1.397
Oktober 2019	9.045	3.13	200
November 2019	9.600	3.00	722
Desember 2019	10.436	2.72	855
January 2020	11.107	2.68	613
Februari 2020	11.522	2.98	985
Maret 2020	11.765	2.96	347
April 2020	11.705	2.67	142
Mei 2020	11.410	2.19	682

Lampiran 2

Output Analisis Data

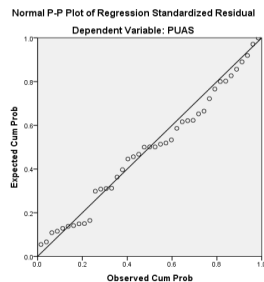
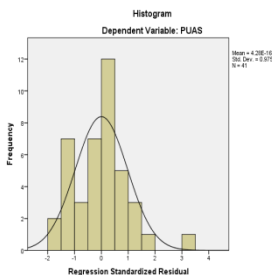
1. Analisis Deskriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	41	2.19	4.37	3.2661	.47449
SBIS	41	8215	14415	11514.39	1521.213
PUAS	41	13	2306	758.44	463.425
Valid N (listwise)	41				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	457.76533196
	Absolute	.087
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.558
Asymp. Sig. (2-tailed)		.914

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

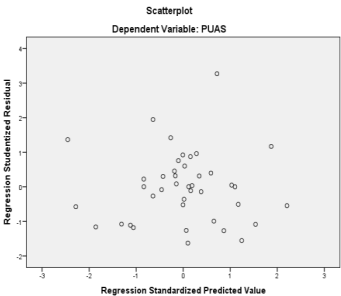
b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	1171.362	808.436		1.449	.156					
1 Inflasi	-148.633	157.457	-.152	-2.175	.037	-.154	-.151	-.151	.988	1.012
SBIS	.006	.049	.021	.128	.899	.037	.021	.021	.988	1.012

a. Dependent Variable: PUAS

c. Uji Heteroskedastisitas



d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.641 ^a	.411	.356	.08848	1.693

a. Predictors: (Constant), SBIS, Inflasi

b. Dependent Variable: PUAS

e. Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1171.362	808.436		1.449	.156
Inflasi	-148.633	157.457	-.152	-2.175	.037
SBIS	.006	.049	.021	.128	.899

a. Dependent Variable: PUAS

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.463	.413	.33724

a. Predictors: (Constant), SBIS, Inflasi

b. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1171.362	808.436		1.449	.156

Inflasi	-148.633	157.457	-.152	-2.175	.037
SBIS	.006	.049	.021	.128	.899

a. Dependent Variable: PUAS

c. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.144	3	1.048	9.215	.000 ^b
Residual	3.639	32	.114		
Total	6.784	35			

a. Dependent Variable: PUAS

b. Predictors: (Constant), SBIS, Inflasi

Lampiran 3

Tabel Nilai Kritis Distribusi dengan Tingkat Signifikansi 5%, $\alpha=0,05$ (Tabel F)

Derajat Bebas Pembilang

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	40
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	246	248	251
2	18.5	19.0	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.70	8.66	8.59
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.69	5.86	5.80	5.72
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.62	4.56	4.46
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	3.94	3.87	3.77
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.51	3.44	3.34
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.22	3.15	3.04
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.01	2.94	2.83
10	4.96	4.10	3.17	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.85	2.77	2.66
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.72	2.65	2.53
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.62	2.54	2.43
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.53	2.46	2.34
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.46	2.39	2.27
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.40	2.33	2.20
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.35	2.28	2.15
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.31	2.23	2.10
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.27	2.19	2.06
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.23	2.16	2.03
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.20	2.12	1.99
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.18	2.10	1.96
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.15	2.07	1.94
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.13	2.05	1.91
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.11	2.03	1.89
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.09	2.01	1.87

30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.01	1.93	1.79
40	4.08	3.23	2.61	2.61	2.45	2.34	2.10	2.18	2.12	2.08	1.92	1.84	1.69
60	4.00	3.15	2.53	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.84	1.75	1.59
>>	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.67	1.57	1.39

Tabel Distribusi t (Tabel t)

Derajat Bebas (df)	Luas Ekor (Uji Satu Arah)					
	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Luas Ekor (Uji Dua Arah)					
	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.820	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.992
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
24	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.699	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.684	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.671	2.042	2.457	2.750	6.551
40	1.303	1.662	2.021	2.423	2.704	3.460
60	1.296	1.658	2.000	2.390	2.660	3.373

>>	1.282	1.645	1.960	2.380	2.617	3.291
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------